

V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan disusun sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Pelabuhan Perikanan No.1 Cirebon Jawa Barat.

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan, sedangkan salah satu fungsinya yakni menyampaikan laporan keuangan sebagai dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas **Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan** berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas”*** Untuk mewujudkannya perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Menyelenggarakan sosialisasi yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kewenangan** pada Tahun Anggaran 2025. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI saat ini adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan sistem terintegrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja dan dirancang berdasarkan proses bisnis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang baru dan dituangkan dalam beberapa modul. SAKTI Modul Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kewenangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeuaran kas dari Kas Umum Negara.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

*Penyusutan
Aset Tetap*

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 merupakan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah melakukan revisi 11 kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dan terdapat perubahan nilai pagu anggaran. Revisi ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan selain juga karena kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja negara sesuai Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penambahan target PNBPN dan pagu yang berasal dari sumber dana PNBPN. Perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut:

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja TA.2025

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	6.548.817.000	8.009.326.000
Jumlah Pendapatan	6.548.817.000	8.009.326.000
Belanja		
Belanja Pegawai	7.388.967.000	8.632.519.000
Belanja Barang	9.420.958.000	9.895.567.000
Belanja Modal	57.589.055.000	58.197.355.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	74.398.980.000	76.725.441.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp 10.478.753.836,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.478.753.836,- atau mencapai 130,83% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar Rp8.009.326.000,-. Pendapatan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pendapatan jasa pelabuhan perikanan (425621), pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi (425151), pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan

(425131), pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122), penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (425912), pendapatan sewa jalan, irigasi dan jaringan (425133) dan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (425811) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi Dan Realisasi Pendapatan TA. 2025

MAP	Uraian	2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
	Penerimaan Perpajakan			
	Penerimaan Negara Bukan Pajak			
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	27.306.000	51.753.878	189,53
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	5.906.724.000	8.161.543.952	138,17
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.075.296.000	2.218.571.400	106,90
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	35.409	100,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yg Lalu	-	2.146.739	100,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	5.154.936	100,00
425133	Pendapatan Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	-	39.547.522	100,00
	Total	8.009.326.000	10.478.753.836	130,83

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.205.672.062,- atau 11,51% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada periode yang sama Tahun 2024. Penurunan pendapatan ini antara lain dikarenakan adanya penurunan yang signifikan pada jenis pendapatan fungsional yakni Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi sebagai akibat adanya perubahan kebijakan berkaitan dengan penggunaan akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, selainjuga Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk jenis pendapatan yang lainnya mengalami kenaikan antara lain Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan.

*Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN	TA.2025	TA.2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	51.753.878	472.189.472	-812,38
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	8.161.543.952	9.405.732.205	-15,24
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.218.571.400	1.772.076.521	20,13
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.154.936	34.427.700	-567,86
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.547.522	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.146.739	-	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.409	-	100,00
Jumlah	10.478.753.836	11.684.425.898	-10,32

Secara rinci yang masuk dalam Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi (425151) : Penggunaan gedung pertemuan; Jasa dump truck, mobil crane, forklift; Jasa pemeliharaan prasarana; Sewa Rumah Dinas. Selanjutnya Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (425621) : Pas masuk kendaraan; Pas wisata bahari; Tambat labuh dan floting repair; Jasa listrik; Jasa kebersihan kolam Pelabuhan; Jasa kebersihan bangunan; Jasa pengolahan air limbah; Penjualan air bersih. Sedangkan Penerimaan Umum berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131); Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan (425133); Pendapatan yang berasal dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122); Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811); dan Penerimaan Kembali Belanja barang TAYL (425912).

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp18.052.908.148,-*

Realisasi Belanja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp18.052.908.148,- atau 23,53% dari total anggaran belanja sebesar Rp76.725.441.000,- dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN). Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per jenis belanja dan per sumber dana Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.632.519.000	8.600.148.015	99,63
Belanja Barang	9.895.567.000	7.604.812.963	76,85
Belanja Modal	58.197.355.000	1.847.947.170	3,18
Total Belanja Bruto	76.725.441.000	18.052.908.148	23,53
Pengembalian		-	
Total Belanja Neto	76.725.441.000	18.052.908.148	23,53

**Rincian Realisasi Belanja TA.2025
Per Sumber Dana**

Sumber Dana		2025			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
RM	Pagu	8.632.519.000	5.662.985.000	-	14.295.504.000
	Realisasi	8.600.148.015	4.630.476.056	-	13.230.624.071
	%	99,63	81,77	-	92,55
PLN	Pagu	-	1.050.000.000	55.300.000.000	56.350.000.000
	Realisasi	-	411.202.282	-	411.202.282
	%	-	39,16	-	0,73
PNBP	Pagu	-	3.182.582.000	2.897.355.000	6.079.937.000
	Realisasi	-	2.563.134.625	1.847.947.170	4.411.081.795
	%	-	80,54	63,78	72,55
Jumlah	Pagu	8.632.519.000	9.895.567.000	58.197.355.000	76.725.441.000
	Realisasi	8.600.148.015	7.604.812.963	1.847.947.170	18.052.908.148
	%	99,63	76,85	3,18	23,53

Secara umum realisasi anggaran untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada periode yang sama Tahun 2024, maka realisasi anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan 16,64% atau sebesar Rp3.603.211.403,- Hal ini dikarenakan terdapat penurunan signifikan pada jenis belanja barang dan belanja modal. Untuk belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp1.142.432.604,- atau 13,06% jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode yang sama pada tahun 2024, penurunan ini salah satunya merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sebagai bentuk optimalisasi penggunaan dana negara sesuai Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sedangkan untuk realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat hanya sebesar Rp1.847.947.170,- dari total pagu belanja modal Tahun

2025 yang sebesar Rp58.197.355.000,- yang itu berarti 3,18% dari total anggaran belanja modal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa anggaran belanja modal yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP yang masuk dalam kategori yang diefisiensikan sedangkan rencana belanja modal sebesar Rp55.350.000.000,- yang bersumber dari pinjaman luar negeri masih dalam tahap proses lelang penyedia sehingga sampai dengan periode 31 Desember 2025 anggaran belanja modal yang bersumber dana dari pinjaman luar negeri tidak dapat direalisasikan yang selanjutnya direncanakan baru akan direalisasikan pada Tahun 2026. Sedangkan untuk belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 4,96% atau Rp406.552.893,- kenaikan ini antara lain disebabkan oleh adanya mutasi pegawai, perubahan data pegawai, penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan fungsional untuk pegawai yang masuk dalam jabatan fungsional tertentu serta penambahan 5 pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 8 pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.600.148.015	8.193.595.122	4,96
Belanja Barang	7.604.812.963	8.747.245.567	(13,06)
Belanja Modal	1.847.947.170	4.715.278.862	(60,81)
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah	18.052.908.148	21.656.119.551	(16,64)

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp8.600.148.015,*

-

Realisasi Belanja Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Tahun Anggaran 2025 yakni sebesar Rp8.600.148.015,- atau 99,63% dari total anggaran belanja pegawai yakni sebesar Rp8.632.519.000,- dan jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024 maka terjadi kenaikan sebesar 4,96% atau sebesar Rp406.552.893,- dari realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024 yang sebesar Rp8.193.595.122,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan

kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai pada Tahun 2025 mengalami kenaikan antara lain disebabkan oleh adanya mutasi pegawai, perubahan data pegawai, penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan fungsional untuk pegawai yang masuk dalam jabatan fungsional tertentu serta penambahan 5 pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 8 pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adanya pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 dan THR, mutasi pegawai, perubahan data pegawai, serta penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan fungsional untuk pegawai yang masuk dalam jabatan fungsional tertentu, dan kenaikan yang paling signifikan adalah belanja pegawai dan tunjangan atas penerimaan pegawai PPPK.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.313.984.642	3.217.642.735	2,99
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS (PPPK)	1.265.444.410	1.137.571.478	11,24
Belanja Lembur	9.956.000	61.255.000	(83,75)
Belanja Tunjangan Kinerja PNS	2.932.224.799	2.757.596.231	6,33
Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS (PPPK)	1.079.098.522	1.020.231.678	5,77
Jumlah Belanja Kotor	8.600.708.373	8.194.297.122	4,96
Pengembalian Belanja Pegawai	560.358	702.000	(20,18)
Jumlah Belanja	8.600.148.015	8.193.595.122	4,96

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp7.604.812.963,-*

Realisasi Belanja Barang Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen pada Tahun 2025 yakni sebesar Rp7.604.812.963,- atau 76,85% dari total anggaran belanja barang Tahun 2025 sebesar Rp9.895.567.000,- sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada Tahun 2024 yang sebesar Rp8.747.245.567,- maka terjadi penurunan sebesar Rp1.142.432.604,- atau 13,06%. Penurunan realisasi belanja barang ini merupakan tindaklanjut atas kebijakan pemerintah terkait

efisiensi anggaran sebagai bentuk optimalisasi penggunaan dana negara sesuai Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga terdapat beberapa jenis belanja barang yang mengalami penurunan signifikan antara lain belanja perjalanan dalam negeri, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja barang non operasional, belanja barang operasional, dan belanja jasa. Meskipun terdapat pula kenaikan signifikan pada jenis belanja pemeliharaan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	849.421.898	1.163.009.608	(26,96)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	592.109.668	843.868.046	(29,83)
Belanja Jasa (5221)	4.919.000.790	5.048.502.497	(2,57)
Belanja Pemeliharaan (5231)	787.185.640	495.205.529	58,96
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	404.992.067	1.091.847.928	(62,91)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (5218)	52.102.900	104.811.959	(50,29)
Jumlah Belanja Kotor	7.604.812.963	8.747.245.567	(13,06)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	7.604.812.963	8.747.245.567	(13,06)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp1.847.947.170,-
-

Realisasi Belanja Modal Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2025 sebesar Rp1.847.947.170,- atau 3,18% dari total anggaran belanja modal Tahun 2025 yakni sebesar Rp58.197.355.000,- sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal pada Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp2.867.331.692,- atau 60,81% dari total realisasi belanja modal Tahun 2024 yang sebesar Rp4.715.278.862,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan pada Tahun 2025 sebesar Rp58.197.355.000,- bersumber dari rupiah murni, PNPB dan pinjaman luar negeri, khusus untuk anggaran belanja modal sumber dana

pinjaman luar negeri sebesar Rp55.300.000.000,- sampai dengan periode 31 Desember 2025 tidak dapat direalisasikan karena masih dalam tahap proses lelang penyedia, selain itu terdapat juga pagu blokir sebesar Rp1.063.081.000,- yang merupakan tindaklanjut atas kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sebagai bentuk optimalisasi penggunaan dana negara sesuai Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sehingga realisasi belanja modal pada Tahun 2025 antara lain belanja peralatan dan mesin yakni pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi berupa laptop, scanner, sound portable, printer, PC unit, UPS, TOA, tablet android dan drone; pengadaan sarana internal berupa AC Split, meja, lemari, timbangan digital, tenda, panggung portable, zet aerator, filling cabinet, kamera dan lain-lain, sedangkan belanja modal jalan dan jembatan berupa rehab trestle wisata bahari selanjutnya belanja modal gedung dan bangunan berupa pembuatan pos kesehatan dan rehab rumah bilas dan MCK fasilitas wisata bahari yang kesemuanya merupakan wujud upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas dilingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

*Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.478.355.000	765.770.393	745,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.939.500.000	635.464.377	7916,11
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	779.500.000	446.712.400	74,50
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	58.197.355.000	1.847.947.170	3049,30
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	58.197.355.000	1.847.947.170	3049,30

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah Rp0,-*

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Pada Tahun 2025 belanja modal tanah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan tidak ada.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp765.770.393,-*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp765.770.393,- atau turun sebesar 76,11% bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember Tahun 2024 yang sebesar Rp3.205.721.400-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yakni pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop, scanner, sound portable, printer, PC unit, UPS, TOA, tablet android dan drone; pengadaan sarana internal berupa AC Split, meja, lemari, timbangan digital, tenda, panggung portable, zet aerator, filling cabinet, kamera dan peralatan yang lain-lain yang merupakan peralatan perkantoran untuk menunjang tugas dan fungsi pelabuhan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan fasilitas dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mendukung penerimaan negara bukan pajak dilingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	765.770.393	3.205.721.400	(76,11)
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	765.770.393	3.205.721.400	(76,11)
Pengembalian			
Jumlah Belanja	765.770.393	3.205.721.400	(76,11)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp635.464.377,-*

Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp635.464.377,- Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp213.314.042 atau 50,53% jika dibandingkan realisasi belanja modal gedung bangunan Tahun 2024 yang sebesar Rp422.150.335,- Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 yakni belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan pos kesehatan fasilitas wisata kesehatan dan penambahan nilai gedung dan bangunan berupa rehab rumah bilas dan MCK fasilitas wisata Bahari kejawanan yang kesemuanya merupakan wujud upaya peningkatan pelayanan dan

fasilitas dilingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.478.000	37.500.000	602,61
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawas	83.072.377	8.323.335	898,07
Belanja Penambahan Nilai Gd dan Bangunan	288.914.000	376.327.000	(23,23)
Jumlah Belanja Kotor	635.464.377	422.150.335	50,53
Pengembalian Belanja Modal Gd Bangunan			
Jumlah Belanja	635.464.377	422.150.335	50,53

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp446.712.400,-*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perbandingan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp446.712.400,- dan Rp1.087.407.127,- Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp640.694.727,- atau 58,92% jika dibandingkan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2024. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2025 yakni belanja modal penambahan nilai jalan dan jembatan berupa rehab trestle wisata bahari kejawanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA. 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan	58.830.400	77.339.427	(23,93)
Belanja Modal Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	795.454.000	(100,00)
Penambahan Nilai Jaringan	-	214.613.700	(100,00)
Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	387.882.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	446.712.400	1.087.407.127	(58,92)
Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	0,00
Jumlah Belanja	446.712.400	1.087.407.127	(58,92)

*Belanja Modal
Lainnya Rp0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 tidak ada.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi bantuan sosial pada Tahun 2025 tidak ada.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal pelaporan neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA.2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	-	-
Kwitansi yg belum di GU kan	-	-
Bank BRI No. 653316224821000	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebesar Rp.0,- dan pada periode yang sama pada Tahun 2024 saldo kas di bendahara penerimaan juga sebesar Rp0,-

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA. 2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Pas Masuk Kendaraan	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNB
Rp7.254.197.570,-

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.254.197.570,- sedangkan pada 31 Desember 2024 Piutang Bukan Pajak tercatat sebesar Rp7.543.913.324,- Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan masih berjalan namun belum diselesaikan pembayarannya pada saat jatuh tempo. Piutang Bukan Pajak pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 berupa biaya tambat labuh, kebersihan kolam, pemeliharaan dan kebersihan kawasan dari 1 pengguna jasa atas nama PT. Hacienda Ocean Industries yang penagihan piutangnya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 2 (dua) kali. Pelimpahan piutang pertama sesuai surat nomor: SP3N-376/PUPNC.13.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 dengan outstanding tagihan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.254.197.570,- dan pelimpahan piutang kedua sesuai surat nomor: SP3N-01/PUPNC.13.06/2019 tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp2.155.730.804,- telah lunas sesuai surat dari Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN nomor: SPPN-52/PUPNC.13.06/2024 tanggal 19 Desember 2024, secara terperinci piutang PNB atas nama PT. Hacienda Ocean Industries dijelaskan pada bagian pengungkapan-pengungkapan lainnya. Selanjutnya terdapat 1 piutang lainnya berupa tagihan Listrik dari 1 pengguna jasa atas nama PT. Hasil Laut Anugrah sebesar Rp1.193.335,- yang telah lunas pada tanggal 8 Januari 2026 dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) 39088490011HSON4.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025

Jenis Biaya	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Pelimpahan I	7.253.004.235	7.543.913.324	(290.909.089)
Pelimpahan II	-	-	-
Piutang Lainnya	1.193.335	-	1.193.335
JUMLAH	7.254.197.570	7.543.913.324	(289.715.754)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA
Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp(7.253.010.202),
-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(7.253.010.020),- sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(7.543.913.324),- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada PPN Kejawanan merupakan total Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar dari Piutang Bukan Pajak atas nama PT. Hacienda Ocean Industries yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN sehingga besaran nilai penyisihan piutang tak tertagihnya adalah 100% dari total piutang atau sebesar Rp(7.253.004.235),- nilai tersebut merupakan penyisihan piutang dari piutang PT. Hacienda Ocean Industries dan terdapat penyisihan piutang yang lain sebesar Rp5.967,- per periode 31 Desember 2025 sehingga nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) adalah sebesar Rp1.187.368,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp0,-

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- dan jika dibandingkan dengan saldo belanja dibayar di muka per 31 Desember 2024 juga sebesar Rp0,- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp888.364.525,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang disajikan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp888.364.525,- sedangkan pada 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp951.013.641,- Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan potensi pendapatan ini antara lain adalah jasa tambat labuh kapal dan kebersihan kolam pelabuhan atas kapal perikanan yang berada dikolam pelabuhan sampai dengan 31 Desember 2024 sejumlah 169 kapal senilai Rp888.364.525,- Secara terperinci dijelaskan pada bagian pengungkapan-pengungkapan lainnya.

C.10 Persediaan

Persediaan Rp45.561.400,-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp45.561.400,- dan Rp25.332.165,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	45.561.400	25.322.165
Barang untuk Pemeliharaan		-
Jumlah	45.561.400	25.322.165

Semua barang konsumsi pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan TP/TGR
Rp0,-*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

*Tanah
Rp.843.681.482.00
0,-*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan per 31 Desember 2025 yakni senilai

Rp843.681.482.000,- dan jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp843.564.917.000,- maka nilai aset tetap tanah pada periode pelaporan ini adalah tetap atau tidak ada transaksi selama periode Tahun 2025. Nilai aset tetap tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	843.681.482.000
Mutasi tambah:	0
Hibah Masuk	0
Perolehan Lainnya	
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi BMN ke PI	0
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2025	843.681.482.000

Tidak ada transaksi mutasi tambah ataupun kurang pada periode Tahun 2025. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

Uraian	Sat	Saldo Per 31 Des 2024		Mutasi				Saldo Per 31 Desember 2025	
				Bertambah		Berkurang			
			Nilai		Nilai		Nilai		Nilai
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	190.020	665.267.917.000	-	-	-	-	190.020	665.267.917.000
Tanah Hasil Reklamasi	M2	64.444	178.413.565.000	-	-	-	-	64.444	178.413.565.000
Jumlah				-	-	-	-	254.464	843.681.482.000

Secara keseluruhan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan berkedudukan diatas tanah seluas 279.185 m2 yang terletak di Jl. Pelabuhan Perikanan No.1 Cirebon dan semua tanah telah bersertifikat HPL dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya sesuai berita acara inventarisasi nomor : B.301/KPB-PPNK/PL.760/IX/2023 tanggal 7 September 2023 menyatakan 1 HPL dengan nomor : 0116 luas 25.130 m2 masuk dalam kriteria properti investasi sehingga dilakukan reklasifikasi BMN ke PI dengan nilai Rp70.364.000.000,-. Dan pada Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 17/SJ/PL.450/I/2024

tertanggal 04 Januari 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah menerima hibah aset perorangan a.n Taryono berupa tanah seluas 409 m2 dengan nilai Rp116.565.000,- sehingga saat ini total luas tanah Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah 279.594 m2.

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp19.378.599.667,
-

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.378.599.667,- jika dibandingkan nilai per 31 Desember 2024 adalah sebesar dan Rp18.913.864.274,-. Terdapat kenaikan sebesar Rp464.735.393,- atau 2,46%. Rincian mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	18.913.864.274
Mutasi tambah:	819.118.453
Transfer Masuk	53.348.060
Pembelian	765.770.393
Mutasi kurang:	354.383.060
Transfer keluar	-
Penghentian Aset dr Penggunaan	354.383.060
Saldo per 31 Desember 2025	19.378.599.667
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	15.508.289.140
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3.870.310.527

Transaksi mutasi tambah berasal dari pembelian berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pengadaan sarana internal. Sedangkan transfer masuk pada nilai aset peralatan dan mesin merupakan transfer aset dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 sedangkan transaksi mutasi kurang merupakan transaksi penghentian aset dari penggunaan pada peralatan dan mesin, secara terinci sebagai berikut :

No	Uraian	Sat	Mutasi			
			Bertambah		Berkurang	
				Nilai		Nilai
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	38.053.002	9	19.855.000
2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	10.680.000	2	20.000.000
3	Camera Digital	Buah	1	7.159.500	3	14.832.500
4	Audio Announcer Desk	Buah	-	-	1	4.500.000

No	Uraian	Sat	Mutasi			
			Bertambah		Berkurang	
				Nilai		Nilai
5	Monitor	Buah	-	-	1	9.130.000
6	Lap Top	Buah	10	207.792.000	3	37.900.000
7	Kamera Udara	Buah	1	14.485.500	1	21.000.000
8	Televisi	Buah	-	-	1	2.000.000
9	P.C Unit	Buah	-	-	12	137.189.560
10	Sofa	Set	1	3.326.060	-	-
11	Kardex Besi	Buah	2	5.328.000	-	-
12	Kursi Besi/Metal	Buah	4	5.883.000	19	7.760.000
13	Mesin Potong	Buah	-	-	4	9.150.000
14	A.C. Split	Buah	6	60.738.090	5	25.950.000
15	Lensa Kamera	Unit	-	-	1	5.850.000
16	Dispenser	Buah	-	-	1	3.700.000
17	Tustel	Buah	-	-	1	3.900.000
18	Brandkas	Buah	-	-	1	1.366.000
19	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	-	-	14	21.500.000
20	LCD Projector/Infocus	Buah	-	-	1	8.800.000
21	Meja Kerja Besi	Buah	2	3.552.000	-	-
22	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	109.028.000	-	-
23	Meja Rapat	Buah	10	22.000.200	-	-
24	Tenda	Buah	3	28.305.000	-	-
25	Loudspeaker	Buah	3	20.150.001	-	-
26	Treadmill Spedroge 2-4 16 KMA Elektrical S	Buah	1	17.982.000	-	-
27	Rak-Rak Penyimpan	Buah	4	11.517.360	-	-
28	Aerator	Buah	1	24.975.000	-	-
29	Drone	Buah	4	30.636.000	-	-
30	Stabilizer/UPS	Buah	2	6.438.000	-	-
31	Lemari Besi/Metal	Buah	4	13.452.000	-	-
32	Panggung	Buah	2	16.983.000	-	-
33	Kasur/Spring Bed	Buah	2	6.993.000	-	-
34	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Buah	1	24.420.000	-	-
35	Tablet PC	Buah	5	88.800.000	-	-
36	Timbangan Elektronik	Buah	3	16.650.000	-	-
37	Rak Besi	Buah	4	11.517.360	-	-
38	Tripod Camera	Buah	1	4.662.000	-	-
39	Filling Cabinet Besi	Buah	3	7.612.380	-	-
Jumlah			89	819.118.453	80	354.383.060

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp28.519.514.593,
-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah Rp28.519.514.593,- jika dibandingkan dengan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang senilai Rp26.951.640.216,- maka nilai gedung dan bangunan pada 31 Desember 2025 mengalami

kenaikan sebesar 5,82% atau Rp1.567.874.377,- salah satu transaksi yang signifikan kenaikannya yaitu berasal dari transaksi perolehan lainnya berupa 1 bangunan gudang tertutup permanen dan 2 bangunan gudang lainnya, selain terdapat juga transaksi pengembangan nilai aset, pembelian dan penyelesaian pembangunan langsung. Rincian transaksi mutasi tambah/kurang terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	26.951.640.216
Mutasi tambah:	2.316.818.377
- Transfer Masuk	1.206.981.000
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	668.854.377
- Reklasifikasi Masuk	440.983.000
Mutasi kurang:	748.944.000
- Penghentian Aset dari Penggunaan	307.961.000
- Perubahan BMN ke PI	-
- Reklasifikasi Keluar	440.983.000
Saldo per 31 Desember 2025	28.519.514.593
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	4.031.567.844
Nilai Buku per 31 Desember 2025	24.487.946.749

Transaksi mutasi tambah dan kurang pada aset gedung dan bangunan secara terinci sebagai berikut :

No	Uraian	Sat	Mutasi			
			Bertambah		Berkurang	
				Nilai		Nilai
1	Bangunan Penampung Sekam Permanen	dummy	-	-	1	67.037.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	-	-	1	240.924.000
3	Tugu Pembangunan	Unit	1	33.390.000	-	-
4	Gedung Bangunan Kantor Permanen	Unit	1	367.282.000		-
5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	1	191.301.000		
6	Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat	Unit			1	215.029.000
7	Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat	Unit	1	215.029.000		
8	Pagar Lainnya	dummy	1	56.485.000		
9	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	2	197.207.000		
10	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	3	225.954.000		
11	Bangunan Kesehatan Lainnya	dummy	1	303.465.822		
12	Taman Semi Permanen	Unit	1	189.570.000		
13	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit			3	225.954.000

No	Uraian	Sat	Mutasi			
			Bertambah		Berkurang	
				Nilai		Nilai
14	Pagar Permanen	Unit	1	205.136.000		
15	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	dummy	1	331.998.555		
	Jumlah		14	2.316.818.377	6	748.944.000

Transaksi bertambah pada aset gedung dan bangunan yakni transfer masuk sebanyak 2 NUP berupa bangunan gedung kantor permanen berupa gedung kantor syahbandar di Pelabuhan Perikanan Karangsong dan 1 tugu pembangunan berupa gapura track mangrove di wisata Bahari kejawan dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 serta terdapat juga transfer masuk sebanyak 9 NUP yang merupakan aset gedung bangunan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : KPB.598/DJPT.1/PL.450/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 selain juga terdapat penyelesaian dengan KDP sebanyak 3 NUP berupa bangunan kesehatan lainnya (Pos Kesehatan WBK), bangunan fasilitas umum lainnya (Rehab MCK WBK) dan reklasifikasi masuk sebanyak 4 NUP total nilai Rp440.983.000,- sedangkan transaksi berkurang merupakan penghentian aset dari penggunaan yakni 1 bangunan penampung sekam permanen senilai Rp67.037.000,- dan 1 gedung pos jaga permanen senilai Rp240.924.000,- serta reklasifikasi keluar sebanyak 4 NUP dengan total nilai Rp440.983.000,-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp103.554.370.01
4,-*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp103.554.370.014,- naik 1,14% atau senilai Rp1.171.817.400,- jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp102.382.552.614,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan

Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	102.382.552.614
Mutasi tambah:	1.171.817.400
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	965.746.400
- Transfer Masuk	206.071.000
Mutasi kurang:	-
- Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	103.554.370.014
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	76.167.103.702
Nilai Buku per 31 Desember 2025	27.387.266.312

Mutasi tambah pada Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa :

No	Uraian	Sat	Mutasi			
			Bertambah		Berkurang	
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Trestle	M2	1	446.712.400	-	-
2	Jalan Khusus Lainnya	M2	258	291.936.000	-	-
3	Jembatan Pada Jalan Khusus Lainnya	M2	110	227.098.000	-	-
4	Saluran Drainage	Unit	1	206.071.000	-	-
			370	1.171.817.400	-	-

Transaksi bertambah pada aset jalan jaringan dan irigasi yakni transfer masuk jalan khusus lainnya berupa jalan track mangrove senilai Rp291.936.000,- dan jembatan pada jalan khusus lainnya berupa trestle dan anjungan senilai Rp227.098.000,- sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : KPB.1002/DJPT.1/PL.450/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 dan terdapat pula transfer masuk berupa saluran drainage senilai Rp206.071.000,- sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : KPB.598/DJPT.1/PL.450/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang kesemuanya berasal dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp14.000.000,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31

Desember 2025 yakni sebesar Rp14.000.000,- jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp14.000.000,- maka nilai aset tetap lainnya pada periode pelaporan ini adalah tetap atau tidak ada transaksi selama tahun 2025. Aset Tetap Lainnya pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan per 31 Desember 2025 yakni berupa buku perencanaan gedung bangunan. Nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 30 Desember 2024	14.000.000
Mutasi tambah:	-
- Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	0
- Pencatatan barang yang mau dihapuskan	-
Saldo per 31 Desember 2025	14.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	14.000.000

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,-*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- dan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 juga sebesar Rp0,-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Rp(95.706.960.686*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(95.706.960.686),- dan Rp(92.188.880.679),- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA.2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	19.378.599.667	15.508.289.140	3.870.310.527
2	Gedung dan Bangunan	28.519.514.593	4.031.567.844	24.487.946.749
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.554.370.014	76.167.103.702	27.387.266.312
4	Aset Tetap Lainnya	14.000.000	0	14.000.000
Jumlah		151.466.484.274	95.706.960.686	55.759.523.588

C.21 Properti Investasi

Properti Investasi
Rp80.406.465.920,
 -

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lesse melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif serta tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Nilai Properti investasi per 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp80.406.465.920,- jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 yang juga sebesar Rp80.406.465.920,- maka nilai properti investasi pada periode pelaporan ini adalah tetap atau tidak ada transaksi pada Tahun 2025 Nilai properti investasi pada Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	80.406.465.920
Mutasi tambah:	-
- Reklasifikasi BMN ke PI	-
Mutasi kurang:	0
- Reklasifikasi PI ke BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	80.406.465.920
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	1.351.484.345
Nilai Buku per 31 Desember 2025	79.054.981.575

Nilai properti investasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan pemindahan nilai aset tetap ke properti investasi senilai Rp80.356.545.920,- sesuai berita acara inventarisasi nomor : B.301/KPB-PPNK/PL.760/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dengan

rincian sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan
1	Tanah Hasil Reklamasi	70.364.000.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	115.128.000
3	Bangunan Gedung Lainnya	4.517.051.448
4	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	958.090.654
5	Bangunan Lainnya	3.349.085.000
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.053.190.818
Jumlah		80.356.545.920

Selanjutnya nilai properti investasi per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah Hasil Reklamasi	70.364.000.000	0	70.364.000.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	115.128.000	6.907.680	108.220.320
3	Bangunan Gedung Lainnya	4.517.051.448	767.898.745	3.749.152.703
4	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar P	1.008.010.654	129.708.684	878.301.970
5	Bangunan Lainnya	3.349.085.000	267.926.800	3.081.158.200
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lair	1.053.190.818	179.042.436	874.148.382
Jumlah		80.406.465.920	1.351.484.345	79.054.981.575

C.22 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp0,-*

Tidak ada saldo dan mutasi Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-

C.23 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp695.922.750,-*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp695.922.750,- dan Rp410.657.750,- yang berarti terdapat kenaikan 69,47% atau sebesar Rp285.265.000,- Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	410.657.750
Mutasi tambah:	662.344.060
- Penghentian Aset dari Penggunaan	662.344.060
Mutasi kurang:	377.079.060
- Transfer Keluar (BMN yang Dihentikan)	-
- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	377.079.060
Saldo per 31 Desember 2025	695.922.750
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	246.371.649
Nilai Buku per 31 Desember 2025	449.551.101

Mutasi tambah dan kurang pada Aset Lain-lain sebagai berikut:

No	Uraian	Sat	Mutasi			
			Bertambah		Berkurang	
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Portable Generating Set	Unit	-	-	2	17.580.000
2	Audio Announcer Desk	Buah	1	4.500.000	1	4.500.000
3	Brandkas	Buah	1	1.366.000	1	1.366.000
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	19.855.000	9	19.855.000
5	Buku Lainnya	dummy	-	-	-	-
6	Mesin Potong	Buah	4	9.150.000	4	9.150.000
7	Video	Buah	-	-	-	-
8	Kursi Besi/Metal	Buah	19	7.760.000	19	7.760.000
9	P.C Unit	Buah	12	137.189.560	12	137.189.560
10	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	Unit	-	-	-	-
11	Lemari Besi/Metal	Buah	-	-	-	-
12	Portable Water Pump	Unit	-	-	2	5.116.000
13	Monitor	Buah	1	9.130.000	1	9.130.000
14	Dispenser	Buah	1	3.700.000	1	3.700.000
15	Tustel	Buah	1	3.900.000	1	3.900.000
16	Lemari Kayu	Buah	-	-	-	-
17	Transportable Water Pump	Unit	-	-	-	-
18	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	14	21.500.000	14	21.500.000
19	Camera Digital	Buah	3	14.832.500	3	14.832.500
20	Lensa Kamera	Buah	1	5.850.000	1	5.850.000
21	A.C. Split	Buah	5	25.950.000	5	25.950.000
22	LCD Projector/Infocus	Buah	1	8.800.000	1	8.800.000
23	Kamera Udara	Buah	1	21.000.000	1	21.000.000
24	Sepeda Motor	Unit	-	-	-	-
25	Kerangka Dasar Kadastral Orde 2	Unit	-	-	-	-
26	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	20.000.000	2	20.000.000
27	Televisi	Buah	1	2.000.000	1	2.000.000

No	Uraian	Sat	Mutasi			
			Bertambah		Berkurang	
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
28	Bangunan Penampung Sekam Permanen	Unit	1	67.037.000	-	-
29	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	240.924.000	-	-
30	Lap Top	Buah	3	37.900.000	3	37.900.000
			82	662.344.060	84	377.079.060

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(246.371.649),-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(246.371.649),- dan Rp(217.406.880),- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Portable Generating Set	-	-	-	-
Transportable Water Pump	1	4.000.000	(4.000.000)	-
Portable Water Pump	-	-	-	-
Sepeda Motor	1	4.900.000	(4.900.000)	-
Lemari Besi/Metal	3	5.966.000	(5.966.000)	-
Lemari Kayu	9	26.753.000	(26.753.000)	-
P.C Unit	4	48.850.000	(48.850.000)	-
Lap Top	3	46.000.000	(46.000.000)	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	23.000.000	(23.000.000)	-
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	7.900.000	(7.900.000)	-
Gedung Pos Jaga Permanen	2	255.569.000	(36.853.155)	218.715.845
Bangunan Penampung Sekam Permanen	1	67.037.000	(13.897.908)	53.139.092
Kerangka Dasar Kadastral Orde 2	1	4.896.000	(1.410.711)	3.485.289
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2	80.935.000	(26.840.875)	54.094.125
Buku Lainnya	2	108.126.750	-	108.126.750
Video	2	11.990.000	-	11.990.000
Jumlah	41	695.922.750	(246.371.649)	449.551.101

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.25 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp173.346.170,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp173.346.170,- sedangkan nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp410.500.138,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga pada PPN Kejawanan per 31 Desember 2025 adalah tagihan langganan listrik, telpon, internet dan air atas pemakaian bulan Desember 2025 yang ditagihkannya pembayarannya pada bulan Januari 2026 dan belanja pegawai berupa pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2025 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 15 orang dan pembayaran uang makan Desember 2025 pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 1 orang dan baru dibayarkan pada Januari 2026. Secara terinci Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Keterangan
Tagihan Langganan Listrik	54.943.023	60.188.529	Sudah di bayarkan pada Januari 2026
Tagihan Langganan Telpon	40.987	272.007	Sudah di bayarkan pada Januari 2026
Tagihan Langganan Air	53.996.880	69.419.280	Sudah di bayarkan pada Januari 2026
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.926.180	5.369.970	Sudah di bayarkan pada Januari 2026
Belanja Barang yang masih harus dibayar -RPATA		275.250.352	Sudah di bayarkan pada Januari 2026
Belanja Pegawai yang masih harus dibayarka	59.439.100		Sudah di bayarkan pada Januari 2026
Jumlah	173.346.170	135.249.786	-

C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0,-*

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- sedangkan nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp0,- Utang Yang Belum Diterima Tagihannya merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan dan pencatatanya berdasarkan Dokumen BAST.

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp2.780.465.840,-*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka diperhitungkan tahunan nilai per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.780.465.840,- dan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.011.573.788,-. Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diterima atau masih berjalan dan belum selesai. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari biaya penggunaan tanah (Pengembangan, Pemeliharaan, dan Kebersihan) dari 75 pengguna jasa yang jangka waktu kontraknya lebih dari periode pelaporan dan nilai Pendapatan Diterima di Muka ini akan disesuaikan pada periode tahunan.

C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.30 Ekuitas

*Ekuitas
Rp976.926.839.547,-*

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp978.035.038.904,- atau naik 0,11% atau Rp1.108.199.357,- jika dibandingkan dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp978.035.038.904,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Operasional

*Pendapatan
PNBP
Rp9.350.195.239,-*

Jumlah Pendapatan Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.350.195.239,- dan jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024 yang sebesar Rp8.998.629.778,- maka terdapat kenaikan sebesar Rp351.565.461,- atau 3,91%. Pendapatan Operasional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yakni pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Operasional
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.131.683.786	437.298.765	158,79
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	398.339.235	897.052.327	(55,59)
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	7.780.589.287	7.664.278.686	1,52
Pendapatan Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	39.547.522	-	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.409	-	100,00
Jumlah	9.350.195.239	8.998.629.778	3,91

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp8.659.587.115,-*

Jumlah Beban Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.659.587.115,- jika dibandingkan dengan 31 Desember Tahun 2024 yang sebesar Rp8.193.595.122,- maka terdapat kenaikan sebesar Rp465.991.993,- atau 5,69%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2025 dan
2024**

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.269.985.900	2.227.353.300	1,91
Beban Pembulatan Gaji PNS	33.360	34.441	(3,14)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(118)	(810)	(85,43)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	193.593.082	192.499.820	0,57
Beban Tunj. Anak PNS	57.572.062	57.986.178	(0,71)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	184.220.000	176.038.000	4,65
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(370.000)	-	100,00
Beban Tunj. PPh PNS	16.637.418	16.069.896	3,53
Beban Tunj. Beras PNS	142.739.820	141.581.100	0,82
Beban Uang Makan PNS	365.101.150	320.715.000	13,84
Beban Tunj. Umum PNS	59.640.000	60.165.000	(0,87)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(190.000)	-	100,00
Beban Gaji Pokok PPPK	838.560.100	766.602.600	9,39
Beban Pembulatan Gaji PPPK	16.462	15.224	8,13
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	(240)	(190)	26,32
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	63.051.040	51.005.120	23,62
Beban Tunjangan Anak PPPK	17.324.968	14.347.154	20,76
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	116.540.000	113.000.000	3,13
Beban Tunjangan Beras PPPK	58.080.840	49.897.380	16,40
Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-	(701.000)	(100,00)
Beban Tunjangan Umum PPPK	3.240.000	-	100,00
Beban Uang Makan PPPK	168.631.000	142.704.000	18,17
Beban Uang Lembur	4.981.000	49.653.000	(89,97)
Beban Uang Lembur PPPK	4.975.000	11.602.000	(57,12)
Beban Pegawai Tunjangan Kinerja PNS	2.932.224.799	2.757.596.231	6,33
Beban Pegawai Tunjangan Kinerja PPPK	1.137.799.472	1.020.231.678	11,52
Jumlah	8.659.587.115	8.193.595.122	5,69

D.3 Beban Persediaan

**Beban
Persediaan
Rp31.873.665,-**

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp31.873.665,- turun 67,08% atau sebesar Rp64.933.529,- dibandingkan dengan jumlah beban persediaan pada periode 31 Desember 2024 yang sebesar Rp96.807.194,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	31.873.665	96.807.194	(67,08)
Jumlah	31.873.665	96.807.194	(67,08)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp6.339.189.640,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.339.189.640,- terdapat penurunan sebesar Rp514.472.384,- atau 7,51% jika dibandingkan beban barang dan jasa pada periode 31 Desember 2024 yang sebesar Rp6.853.662.024,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN BARANG DAN JASA	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Keperluan Kantor	611.524.348	908.065.032	(32,66)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	2.521.235	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	388.500	2.255.030	(82,77)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	130.149.000	92.693.880	40,41
Beban Barang Operasional Lainnya	107.360.050	157.474.431	(31,82)
Beban Bahan	508.750.466	669.840.788	(24,05)
Beban Honor Output Kegiatan	19.600.000	58.050.000	(66,24)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	34.025.202	115.977.258	(70,66)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	29.734.000	0	100,00
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	8.323.335	100,00
Beban Langganan Listrik	652.889.316	739.107.085	(11,67)
Beban Langganan telepon	572.389	1.160.023	(50,66)
Beban Langganan Air	915.411.640	902.747.570	1,40
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	113.840.333	97.706.440	16,51
Beban Jasa Konsultan	16.638.900	0	100,00
Beban Jasa Sewa	18.520.000	106.605.000	(82,63)
Beban Jasa Profesi	58.000.000	0	100,00
Beban Jasa Lainnya	3.121.785.496	2.991.134.917	4,37
Jumlah	6.339.189.640	6.853.662.024	(7,51)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp787.185.640,
-

Beban Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp787.185.640,- terdapat kenaikan sebesar Rp291.980.111,- atau 58,96% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024 yang sebesar Rp495.205.529,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan antara lain disebabkan beban pemeliharaan gedung dan bangunan dan beban pemeliharaan peralatan dan mesin yang mengalami kenaikan signifikan sedang untuk beban pemeliharaan jaringan mengalami penurunan. Rincian beban pemeliharaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	339.283.000,	160.011.000	112,04
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	373.216.711,	232.574.731	60,47
Beban Pemeliharaan Irigasi	24.835.000,	24.675.000	0,64
Beban Pemeliharaan Jaringan	49.850.929,	77.944.798	(36,04)
Jumlah	787.185.640	495.205.529	58,96

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp404.992.067,
-

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp404.992.067,- turun Rp686.855.861,- atau 62,91% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024 yang sebesar Rp1.091.847.928,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas merupakan tindaklanjut atas kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sebagai bentuk optimalisasi penggunaan dana negara sesuai Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga beban perjalanan dinas secara umum mengalami penurunan yang

signifikan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	368.673.889	952.422.601	-61,29
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.755.000	28.500.000	-62,26
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.500.000	18.875.000	-86,75
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.063.178	92.050.327	-74,95
Jumlah	404.992.067	1.091.847.928	-62,91

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,-*

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp3.937.695.853,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.937.695.853,- jika dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar Rp4.813.943.623,- maka terdapat penurunan sebesar Rp876.247.770,- atau 18,20%. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.397.610.299	1.348.060.369	3,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	590.471.041	570.335.898	3,53
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.251.942.874	1.577.065.951	-20,62
Beban Penyusutan Irigasi	283.168.885	892.308.893	-68,27
Beban Penyusutan Jaringan	203.988.881	222.578.929	-8,35
Beban Penyusutan Properti Investasi	200.479.063	199.947.999	100,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	10.034.810	3.645.584	175,26
Jumlah Penyusutan	3.937.695.853	4.813.943.623	-18,20
Beban Amortisasi Software			0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain			0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(290.903.122
),-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(290.903.122),- dan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp(3.326.398.332),- Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 ini berasal dari penyisihan piutang atas pembayaran piutang yang telah diserahkan ke KPKNL a.n PT. Hacienda Ocean Industries selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp290.909.089 dan penyisihan piutang lancer yang lain sebesar Rp5.967,- per periode 31 Desember 2025.

D.12 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp5.154.936,-*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Surplus Pelepasan Aset	5.154.936	33.556.366	84,64
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	6.478.046.000	100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.154.936	6.511.602.366	(99,92)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp978.035.038.
904,-*

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp978.035.038.904,- naik 0,62% atau sebesar Rp6.047.917.926,- jika dibandingkan dengan nilai ekuitas awal pada 31 Desember Tahun 2024 yang sebesar Rp971.987.120.978,-

E.2 Surplus/Defisit LO

*Surplus/Defisit
LO
Rp(10.514.270.
683),-*

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(10.514.270.683),- sedangkan pada periode yang sama Tahun 2024 Defisit LO sebesar Rp(2.708.430.944),- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,-*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0,-*

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan bagian dari pos Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antar lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar pada LPE. Koreksi atas reklasifikasi digunakan untuk

menyajikan akun Koreksi atas transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN dari Aplikasi SAKTI Modul Persediaan dan Aset. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp0,- dan tahun 2024 adalah sebesar Rp0,-

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi
Rp(17.201.680),-*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 yakni sebesar Rp(17.201.680),- yang berasal dari penyusutan atas transaksi transfer masuk aset tetap dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sedangkan pada tahun 2024 diperiode yang sama adalah sebesar Rp10.350.800,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Uraian	TA. 2024	TA. 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(17.201.680)	10.350.800	(27.552.480)	266,19
	-	-	-	-
Jumlah	(17.201.680)	10.350.800	(27.552.480)	266

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp0,-*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- dan periode yang sama pada Tahun 2024 sebesar Rp(1.342.260.583),- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp9.423.273.006,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.423.273.006,- dan Rp10.088.258.653,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	18.052.908.148	21.656.119.551	-16,64
Diterima dari ke Entitas Lain	(10.478.753.836)	(11.684.425.898)	-10,32
Transfer Keluar	-	-	0,00
Transfer Masuk	1.849.118.694	-	100,00
Pengesahan Hibah Langsung	-	116.565.000	-100,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-	0,00
Jumlah	9.423.273.006	10.088.258.653	(6,59)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025 nilai Diterima dari Entitas Lain (DDEL) adalah sebesar Rp(10.478.753.836),- dan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp18.052.908.148,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.849.118.694,- dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0,-

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp976.926.839.
547,-*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp976.926.839.547,- terdapat penurunan 0,11% atau sebesar Rp1.108.199.357,- jika dibandingkan dengan ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 yang sebesar Rp978.035.038.904,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Piutang Bukan Pajak di PPN Kejawanan atas 1 (satu) pengguna jasa a.n PT. Hacienda Ocean Industries (HOI) sejak 01 Januari 2016 s.d 18 Februari 2018 senilai Rp11.914.580.846,- terdiri atas piutang biaya jasa tambat, labuh dan kebersihan kolam, serta biaya penggunaan tanah berupa biaya pemeliharaan dan biaya kebersihan kawasan pelabuhan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A.	Piutang Tambat/Labuh dan Kebersihan Kolam	
1.	Tagihan Tahun 2016	5.071.789.930
a	Tambat/Labuh Tahun 2016	5.015.632.900
b	Kebersihan Kolam Tahun 2016	56.157.030
2.	Tagihan Tahun 2017	6.221.355.735
a	Jumlah denda piutang pokok TA 2016	101.435.798
b	Tambat/Labuh Tahun 2017	4.808.570.100
c	Kebersihan Kolam Non Perikanan	52.319.610
d	Denda piutang pokok TA 2016 terhitung per 1 Februari 2017 s.d Bulan Desember 2017	1.259.030.227
3.	Tagihan Tahun 2018	566.075.999
a	Jumlah denda piutang pokok TA 2017	97.217.794
b	Tambat/Labuh Tahun 2018	364.940.000
c	Kebersihan kolam non perikanan	4.756.055
d	Denda piutang pokok TA 2017 terhitung per tanggal 1 Februari 2018	99.162.150
Sub Total A		11.859.221.664
B.	Piutang Biaya Jasa Penggunaan Tanah	
1	Biaya Penggunaan Tanah Tahun 2017	55.359.182
Sub Total B		55.359.182
TOTAL (A+B)		11.914.580.846

PPN Kejawanan telah menyerahkan pengurusan piutang Negara a.n PT HOI tersebut kepada KPKNL Cirebon pada tanggal 21 Februari 2018 (**Pelimpahan ke-1**) dan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat telah menerima sebagaimana surat SP3N Nomor : SP3N-376/PUPNC.13.06/2018 tanggal 27 Februari 2018;

2. Piutang Bukan Pajak di PPN Kejawanan atas 1 (satu) pengguna jasa a.n PT. Hacienda Ocean Industries (HOI) sejak 19 Februari 2018 s.d 31 Desember 2018 senilai Rp2.155.730.804,- terdiri atas piutang biaya jasa tambat, labuh dan kebersihan kolam, serta biaya penggunaan tanah berupa biaya pemeliharaan dan biaya kebersihan kawasan pelabuhan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A.	Piutang Tambat/Labuh dan Kebersihan Kolam	
1.	Tagihan Tahun 2018 (19 Feb s.d 31 Des 2018)	
a	Tambat/Labuh	2.072.353.270
b	Kebersihan Kolam	28.476.700
Sub Total A		2.100.829.970
B.	Piutang Biaya Jasa Penggunaan Tanah	
1	Biaya Penggunaan Tanah Tahun 2018	54.900.834
Sub Total B		54.900.834
TOTAL (A+B)		2.155.730.804

PPN Kejawanan telah menyerahkan pengurusan piutang Negara Tahun 2018 a.n PT HOI tersebut kepada KPKNL Cirebon pada tanggal 04 Februari 2019 (**Pelimpahan ke-2**) dan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat telah menerima sebagaimana surat SP3N Nomor : SP3N/01/PUPNC.13.06/2019 tanggal 04 Maret 2019;

3. Total Piutang PPN Kejawanan a.n PT. HOI yang telah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Cirebon senilai Rp.14.070.311.651,- dan tidak disertai dengan agunan atau barang sitaan;
4. PT. HOI telah menindaklanjuti hutangnya kepada Negara dengan melakukan pembayaran secara diangsur ke KPKNL Cirebon sebesar Rp.220.000.000,- sejak bulan Maret 2019. KPKNL Cirebon selanjutnya menyerahkan hak penyerah piutang (PPN Kejawanan) sebesar Rp.200.000.000,- sedangkan Rp.20.000.000,- merupakan biaya administrasi pengurusan piutang Negara (10%) yang dipungut oleh KPKNL Cirebon yang dicatatkan sebagai pendapatan bukan

pajak pada KPKNL Cirebon.

5. Pelimpahan Piutang PPN Kejawanan a.n PT. HOI (Pelimpahan ke-2) sesuai SP3N Nomor : SP3N/01/PUPNC.13.06/2019 tanggal 04 Maret 2019 senilai Rp.2.155.730.804,- telah diterbitkan Surat Paksa oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat Nomor : SP-38/PUPNC.13.06/2019 tanggal 19 September 2019.
6. Berdasarkan surat nomor : 323/WKN.08/KNL.06/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyampaian Informasi Penatausahaan Piutang Negara an. PT.Hacienda Ocean Industries, bahwa pencatatan asset piutang pada neraca Laporan Keuangan Satker PPN Kejawanan adalah sesuai dengan nilai pokok penyerahan yaitu sebesar Rp. 14.070.311.650,- adapun biaya administrasi pengurusan piutang Negara sebesar 10% dari nilai pokok piutang yang diserahkan yaitu sebesar Rp. 1.407.031.165,- merupakan PNBPN yang dikelola oleh KPKNL Cirebon. Penyisihan Piutang Negara sesuai Buletin Teknis Standar Piutang Negara (SAP) No. 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua diatur bahwa piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang serta menyisihkan sebesar 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut. Sesuai dengan PMK Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara pada pasal 6 ayat (1) huruf d diatur bahwa piutang Negara yang diserahkan kepada PUPN kategorinya adalah piutang macet dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) maka penyisihan piutangnya adalah 100%.
7. Telah dilaksanakan penandatanganan perpanjangan perjanjian penggunaan tanah Nomor : 1759/PPNK/PL.210/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 antara

Kepala PPN Kejawanan dengan Direktur PT. Hacienda Ocean Industries dengan jangka waktu 5 tahun. PT. HOI telah melakukan pembayaran atas biaya penggunaan tanah tersebut untuk 1 (satu) tahun pertama senilai Rp.122.625.000 (NTPN :366FF2G4UB1869VJ)

8. PT. HOI menyampaikan surat permohonan kepada KPKNL Kota Cirebon pada tanggal 08 April 2020 untuk penjadwalan ulang atas cicilan hutangnya. Selanjutnya KPKNL Cirebon menindaklanjuti dengan surat Nomor S-130/WKN.08/KNL.06/2021 tanggal 05 Februari 2021 perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Keringanan Jangka Waktu Pembayaran Hutang yang harus dilengkapi.
9. Berdasarkan surat KPKNL Cirebon nomor : S-879/WKN.08/KNL.06/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Pembayaran Angsuran Hutang PT. HOI disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa PT. HOI untuk sementara waktu akan melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulan;
 - b. Jumlah pembayaran setiap bulan yang akan dilakukan PT. HOI belum sesuai dengan aturan yang ada, namun pembayaran tersebut akan mengurangi saldo hutang PT. HOI kepada Negara;
 - c. Apabila PT. HOI tidak segera melunasi hutang, maka sesuai peraturan yang ada KPKNL akan melakukan tahap penggunaan pengurusan berikutnya yaitu berupa penyitaan terhadap kekayaan lain milik penanggung hutang/penjamin hutang, dalam hal ini harta kekayaan milik direksi atau pengurus perusahaan dan/atau milik anggota dewan komisaris atau dewan pengurus perusahaan.
10. PT. HOI sejak Mei 2021 membayar piutang sebesar Rp.20.000.000,- setiap bulannya melalui KPKNL Cirebon

kemudian KPKNL mengenakan biaya administrasi pengurusan piutang Negara sebesar 10% dari nilai pokok piutang yang diserahkan yaitu sebesar Rp.1.818.181,- yang merupakan PNBP yang dikelola oleh KPKNL Cirebon.

11. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hutang PNBPT. HOI pada tanggal 14 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh pihak PT. HOI, PPN Kejawanan, Perwakilan Setditjen PT, Perwakilan Inspektorat II dan KPKNL Cirebon dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembayaran hutang PNBPT. HOI sebesar Rp10.797.584.384 (data outstanding per 14 Mei 2024) ditambah biaya administrasi sebesar 10% diselesaikan selama 20 bulan dengan rincian sebagaimana terlampir pada BA tersebut.
- b. PPN Kejawanan dan PT. HOI segera menginventarisasi Bersama barang milik yang akan diserahkan kepada negara.
- c. Komitmen PT. HOI dalam melaksanakan pembayarandi bulan pertama menjadi persyaratan pemanfaatan Kembali tanah dan/atau bangunan di PPN Kejawanan.
- d. PT. HOI diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan selama 3 bulan sejak berakhirnya masa perjanjian (4 Mei 2024)

12. Tahun 2024 PT. HOI sampai dengan Desember 2024 telah membayar piutang secara angsuran dengan total sebesar Rp1.984.137.749,- melalui KPKNL Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Buku	NTPN	
01 Februari 2024	D0C943CIFJU2IUU7	18.181.818
01 Maret 2024	9EA747QLUOT07NEJ	18.181.818
01 April 2024	54ECB61QV3R68BLM	18.181.818
02 Mei 2024	938EE48VVEPDQP93	18.181.818
31 Mei 2024	494D37QLUP3RN0AK	18.181.818
31 Mei 2024	0A31048VVEQA41TQ	1.079.758.438
18 Oktober 2024	104112G4VQ41PO7M	181.818.181
19 Desember 2024	05A3B6U8EV5VGS67	631.652.040
JUMLAH		1.984.137.749

13. PT. HOI atas pelimpahan piutang ke-1 sesuai SP3N Nomor : SP3N-376/PUPNC.13.06/2018 sampai dengan bulan Desember 2024 telah dibayarkan sebesar Rp4.370.667.522,- dengan rincian pembayaran piutang sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal	Jumlah Angsuran	Saldo Akhir Terhadap Total Piutang (Rp)
2019	11.914.580.846	2.000.000.000	9.914.580.846
2020	9.914.580.846	600.000.000	9.314.580.846
2021	9.314.580.846	163.636.362	9.150.944.484
2022	9.150.944.484	199.999.998	8.950.944.486
2023	8.950.944.486	236.363.634	8.714.580.852
2024	8.659.221.670	1.170.667.528	7.488.554.142
		4.370.667.522	7.543.913.324

14. PT. HOI atas pelimpahan piutang ke-2 pada tanggal 18 Oktober 2024 telah mengangsur sebesar Rp.181.818.181,- dengan nomor NTPN : 104112G4VQ41PO7M selanjutnya pada tanggal 19 November 2024 PT. HOI mengajukan permohonan keringanan penyelesaian hutang (*crash program*) kepada KPKNL Cirebon yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2024 KPKNL Cirebon menyetujui permohonan keringanan utang a.n PT. HOI sesuai surat nomor : S-3519/KNL.0806/2024 dengan ketentuan harus membayarkan sebesar Rp.694.817.244,- (termasuk biad) dan telah dibayarkan oleh PT. HOI pada tanggal 19 Desember 2024 dengan NTPN : 05A3B6U8EV5VGS67, dan

atas pembayaran tersebut Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat telah menerbitkan surat pernyataan piutang negara lunas sesuai surat nomor : SPPNL-52/PUPNC.13.06/2024 tanggal 19 Desember 2024.

15. Pada Tahun 2025 PT. HOI sampai dengan Juni 2025 telah membayar piutang secara angsuran dengan total sebesar Rp290.909.089,- melalui KPKNL Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Buku	NTPN	
21 Maret 2025	5313661QVD2RETG5	136.363.636
05 Mei 2025	289C948VVO3HD8AO	45.454.545
09 Juli 2025	CDBAA0NA0E02LFMG	9.090.909
02 September 2025	9F1D355DFJ1NCHM1	9.090.909
31 Oktober 2025	E41A86U8F8ACRBNP	90.909.090
JUMLAH		290.909.089

16. Sehingga total nilai akhir piutang PNBP a.n PT HOI per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.253.004.235,-

Jenis Biaya	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam	7.253.004.235	7.543.913.324	(290.909.089)
Pemeliharaan Kawasan	-	-	-
Kebersihan Kawasan	-	-	-
JUMLAH	7.253.004.235	7.543.913.324	(290.909.089)

17. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka pada neraca Tahunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.780.465.840,- berupa biaya penggunaan tanah (Pengembangan, Pemeliharaan, dan Kebersihan) dari 76 pengguna jasa yang jangka waktu kontraknya lebih dari periode pelaporan. Rincian nilai pendapatan diterima dimuka per pengguna jasa *terdapat pada lampiran*.

Jenis Pendapatan	Nilai
Sewa	2.452.569.787
Penggunaan tanah	251.518.037
Kebersihan kawasan	76.378.016
Jumlah	2.780.465.840

18. Nilai pendapatan yang masih harus diterima pada neraca Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp888.364.525,- berupa potensi pendapatan yang berasal dari jasa tambat labuh kapal dan kebersihan kolam pelabuhan atas kapal perikanan yang berada dikolam pelabuhan sampai dengan 31 Desember 2025 sejumlah 169 kapal. *Secara terperinci ada pada lampiran.*
19. Kertas kerja capaian output pada bulan Desember 2025 *terlampir.*
20. Pada tahun 2025 terdapat transaksi belanja peralatan dan mesin – ekstrakomptabel sebesar Rp29.734.000,- berupa kursi besi sebanyak 110 buah.
21. Terdapat dana yang dibatasi penggunaannya dengan total nilai sebesar Rp149.981.901,- berupa belanja jasa lainnya pengadaan tenaga outsourcing jasa satpam Rp75.632.869,- dan tenaga kebersihan Rp74.349.032,- yang dibayarkan dengan mekanisme RPATA dan telah dibayarkan pada 31 Desember 2025.
22. Pada Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan memperoleh anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp56.350.000.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp411.202.282,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	1.050.000.000	411.202.282	39,16
Belanja Modal	55.300.000.000	-	-
Total Belanja Bruto	56.350.000.000	411.202.282	0,73
Pengembalian		-	
Total Belanja Neto	56.350.000.000	411.202.282	0,73

23. Realisasi Belanja Barang Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Tahun 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri yakni sebesar Rp411.202.282,- atau 39,16% dari

total anggaran belanja barang yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp1.050.000.000,-. Realisasi belanja barang yang bersumber dari pinjaman luar negeri secara terinci sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Barang
TA 2025*

Akun	URAIAN	Pagu	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi
521211	Belanja Bahan	97.837.000	8.507.000	89.330.000	89.330.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	580.000.000		580.000.000	-
522131	Belanja Jasa Konsultan	23.312.000	6.620.000	16.692.000	16.638.900
522151	Belanja jasa Profesi	64.000.000	5.627.000	58.373.000	58.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	202.849.000	14.829.000	188.020.000	187.584.410
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.002.000	20.853.000	52.149.000	52.148.972
524114	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	1.490.000	7.510.000	7.500.000
		1.050.000.000		992.074.000	411.202.282

Sisa pagu belanja barang Tahun 2025 sebesar Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) merupakan anggaran atas Pembayaran Perizinan Reklamasi Pelabuhan Perikanan dengan jenis penarikan Special Account (Rekening Khusus) melalui KPPN Cirebon. Pagu tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun Anggaran 2025 dikarenakan e-billing pembayaran perizinan reklamasi pelabuhan perikanan baru terbit pada tanggal 22 Desember 2025 dengan mekanisme pembayarannya menggunakan UP/TUP sedangkan batas pengajuan TUP pada tanggal 05 Desember 2025 sehingga tidak dapat direalisasikan.

24. Realisasi Belanja Modal Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp0,- dari total anggaran belanja modal Tahun 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri yakni sebesar Rp55.300.000.000,-. Rincian pagu belanja modal pada Tahun 2025 yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebagai berikut :

*Realisasi Belanja Modal
TA 2025*

Akun	URAIAN	Pagu	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.300.000.000	0	50.300.000.000	-
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000.000	66.166.000	4.933.834.000	-
		55.300.000.000		55.233.834.000	0

Pagu anggaran Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp55.300.000.000,- (lima puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah) merupakan anggaran atas pekerjaan Civil Works (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil) dan Pengadaan Heavy Equipment dengan jenis penarikan Direct Payment (Pembayaran Langsung) melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Pagu Anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun Anggaran 2025 dikarenakan pada pekerjaan Civil Works (Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Sipil) masih dalam tahap proses lelang sehingga tahap pembangunan fisik belum berjalan sedangkan untuk pengadaan Heavy Equipment persetujuan NOL dari Lender baru terbit di akhir bulan Desember sehingga tidak bisa dilakukan pengadaannya pada Tahun 2025.